BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Tulungagung

a. Keadaan Geografi

Gambar 4.1
Peta Kab. Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Kabupaten Tulungagung secara astronomis terletak pada posisi antara 07 51’ – 08 18’ Lintang Selatan dan antara 111 43’ – 112 07’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tulungagung memiliki

batas-batas: Utara – Kabupaten Kediri, Selatan - Samudera Hindia, Barat – Kabupaten Trenggalek, Timur – Kabupaten Blitar.[113]

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 km^2 habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tulungagung dialiri sungai, kecuali Kecamatan Tanggunggunung dan Pucanglaban.

Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Tulungagung kurang lebih ada 23 sungai, yang mana ada beberapa sungai yang melewati lebih dari 1 kecamatan. Misalnya Sungai Parit Agung (melintasi selatan Kabupaten Tulungagung), Sungai Song (melintasi barat Kabupaten Tulungagung) dan Sungai Brantas (melintasi utara Kabupaten Tulungagung). Sedangkan bila dilihat dari jarak rata-rata dari kecamatan ke ibukota kabupaten yang memiliki jarak terjauh adalah Kecamatan Pucanglaban yakni sejauh 36 km.[114]

---

[113] Badan Pusat Statistik Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2020*, dalam *https://tulungagungkab.bps.go.id/publication/download*, diakses pada Senin, 10 Agustus 2020, pukul 18.26, hal. 3

[114] *Ibid.*, hal. 4

b. Pemerintah

Pemerintahan merupakan suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.[115] Dalam pemerintahannya, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Maka peran Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi. [116]

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam desa/ kelurahan. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 271 desa/kelurahan, 619 dusun/lingkungan, 1 861 Rukun Warga (RW) dan 6 406 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa

[115] *Ibid.*, hal. 29
[116] *Ibid.*, hal.30

terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa. sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.[117]

Berdasarkan tabel 4.1 dibawah, data realisasi pendapatan pemerintah kabupaten Tulungagung menurut jenis pendapatan dari tahun 2015- 2019 yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun perekonomian di Tulungagung mengalami peningkatan.

Tabel 4.1
Data Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2016- 2019 (ribu rupiah)

Tahun	Nominal
2016	2.570.286.318.417
2017	2.598.104.487.656,52
2018	2.701.521.943.375,02
2019	2.762.648.022.725,10

Sumber: Badan Pusat Statistika Tulungagung 2020, data diolah.[118]

Berdasarkan tabel 4.2 dibawah ini akan dipaparkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Jenis dan Tahun Anggaran di Kabupaten, tahun 2016-2019 yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun PAD di Tulungagung mengalami penerimaan yang fluktuatif.

[117] *Ibid.*, hal. 30
[118] *Ibid.*, hal. 79-80.

Tabel 4.2
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Jenis dan Tahun Anggaran di Kabupaten, tahun 2016- 2019 (rupiah)

Jenis Pendapatan	Tahun			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
Pos Pajak Daerah	67.457.168.815, 00	85.826.143.046,20	95.695.360.190,28	102.597.224.519,00
Pos Retribusi Daearah	22.674.086.533,00	23.258.789.789,00	25.216.161.763,00	28.267.220.049,00
Pos bag. Laba persh. Milik daerah dan hasil pengeolaandaerah yang dipisahkan	4.553.186.053,00	5.165.807.050,10	5.301.851.819,50	6.459.328.149,20
Pos lain-lain PAD yang sah	247.893.109.687,00	388.852.654.997,22	326.913.892.264,83	349.037.128.044,17
Jumlah	**342.577.551. 088,00**	**503.103.394.882,52**	**453.127.266.037,61**	**486.360.900.761,37**

Sumber: Badan Pusat Statistika Tulungagung 2020, data diolah.[119]

c. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dibanding tahun 2018. yaitu dari 1.110.921 jiwa menjadi 1.118.814 jiwa di tahun 2019. yang terbagi atas laki-laki 559.265 jiwa dan perempuan 559.549 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.060 jiwa/km2. Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar

[119] Badan Pusat Statistik Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2020*, ..., diakses pada Senin, 10 Agustus 2020, pukul 20.34, hal. 83

kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa/km2 namun di sisi lain ada yang kurang dari 300 jiwa/km^2.[120] Berikut tabel jumlah penduduk di Tulungagung:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Laki-laki	497.698	500.191	508 621	504 804	506 702
Perempuan	523.492	525.910	534 561	530 486	532 582
Jumlah	1.021.190	1.026.101	1 043 182	1 035 290	1 039 284

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Tulungagung mengalami peningkaan meskipun peningkatannya tidak teralalu banyak. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.021.190 jiwa dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.026.101 jiwa dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 yakni menjadi 1.039.284 jiwa.

2. Profil Bapenda Kabupaten Tulungagung

a. Lokasi Geografis Bapenda Kabupaten Tulungagung

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung beralamatkan di Jalan A. Yani Timur No. 37, Kampung Dalem, Kecamatan Tulungagung,

[120] *Ibid.*, hal. 101

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66217. Terletak dibelakang kantor bupati Tulungagung.

b. Visi dan Misi Bapenda Kabupaten Tulungagung

1.) Visi

Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang Profesional, Handal, Berkualitas dalam Tata Kelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.

2.) Misi

Misi I : Meningkatkan Penerimaan Daerah yang Terukur Secara Rasional dan Transparan Berdasarkan Kepatuhan yang Tinggi dan Menegakkan Peraturan yang Adil.

Misi II : Meningkatkan Kemandirian Daerah dalam Pembiayaan Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan.

Misi III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang Berkualitas, kompetensi Unggul dan Profesional.

Misi IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Modern.

Misi V : Meningkatkan Koordinasi dengan Institusi lain dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Tulungagung

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Tulungagung

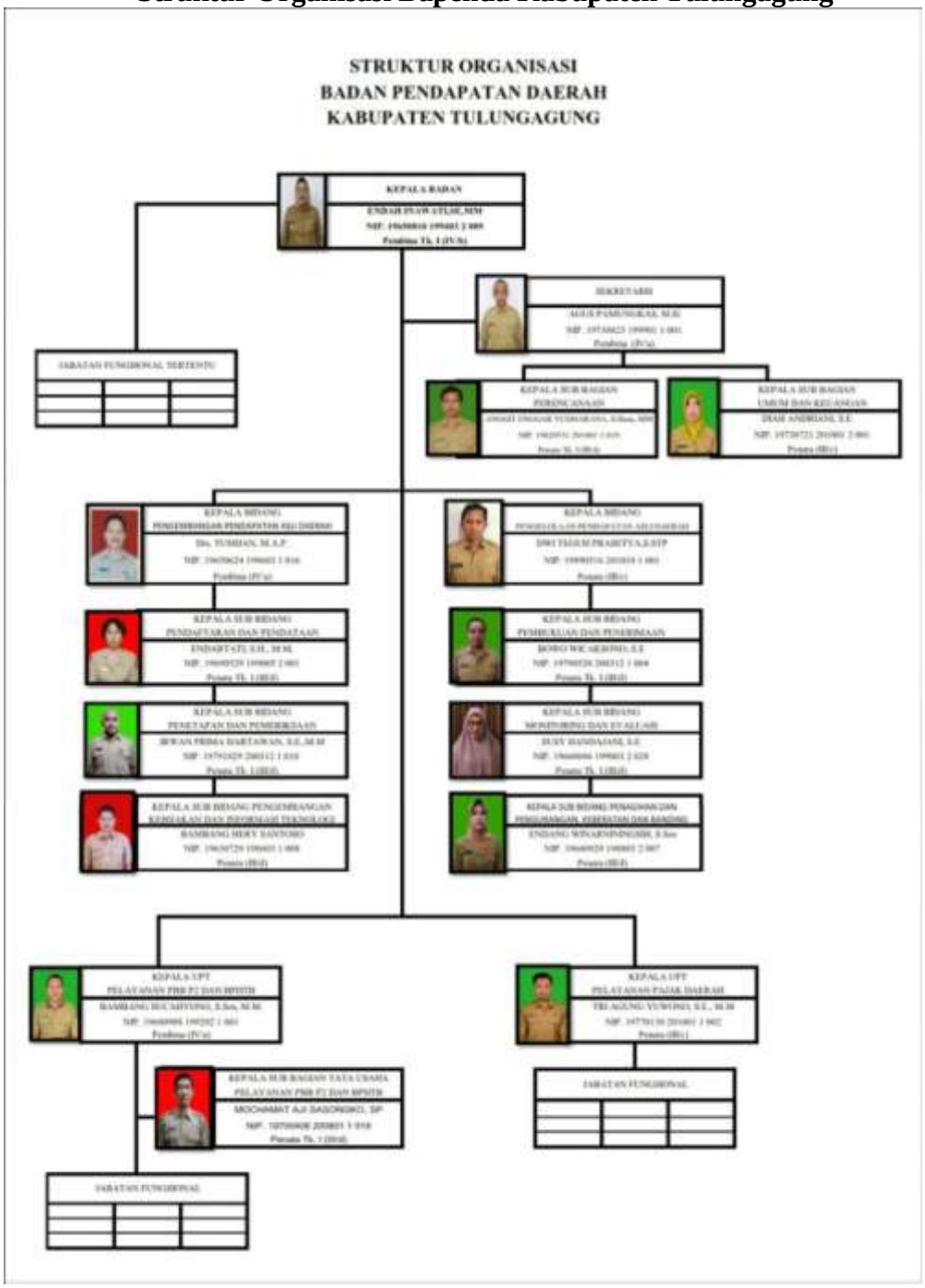

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Stationeritas Data

Metode stationeritas data yang digunakan untuk menguji kestasioneran data time series dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller yaitu *Augmentasi Dickey Fuller Test (ADF)*. Uji stationeritas yang akan digunakan adalah uji ADF (*Augmentasi Dickey Fuller Test)* dengan menggunakan taraf nyata 5%. Jika pada nilai t-ADF lebih kecil dari nilai kritis (probabilitas), maka bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan adalah stasioner (tidak mengandung akar unit).

a. Uji ADF tingkat level

Tabel 4.4
Hasil Uji ADF Tingkat Level

Variabel	Probabilitas	Keterangan
PAD	0.0000	Stationer
PBB	0.5943	Tidak Stationer
BPHTB	0.0990	Tidak Stationer
PAJAK HOTEL	0.6041	Tidak Stationer

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji ADF pada tingkat level adalah probabilitas yang lebih kecil dari 5% pada uji stasioner tingkat level hanya terjadi di variabel PBB atau dinamakan dengan data yang telah stasioner dengan probabilitas sebesar 0.0000. Sedangkan pada variabel BPHTB dan Pajak Hotel dinyatakan belum stasioner, karena probabilitas lebih dari 5%, maka uji statisioner dilanjutkan pada tingkat *first different*.

b. Uji ADF Tingkat 1st *different*

Tabel 4.5
Hasil Uji ADF Tingkat 1st Different

Variabel	Probabilitas	Keterangan
PAD	0.0001	Stationer
PBB	0.0001	Stationer
BPHTB	0.0000	Stationer
PAJAK HOTEL	0.0000	Stationer

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan hasil Uji ADF pada tabel 4.5 diatas, Seluruh data stasioner pada taraf nyata 5% setelah dilakukan uji stasioneritas data pada tingkat *first difference*.

2. Uji Panjang *Lag Optimal*

Tahap berikutnya yaitu penentuan *lag optimal* sebagai estimasi VAR. *Lag optimal* dari variabel endogen merupakan variabel independen yang digunakan dalam model. Pengujian panjang lag optimal ini berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Kandidat lag yang terpilih adalah panjang lag menurut kriteria *Likehood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Crition* (AIC), *Schwarz Information Crition* (SC), dan *Hannan-Quin Crition* (HQ). Penetuan lag optimal dengan menggunakan kriteria informasi tersebut diperoleh dengan memilih kriteria yang mempunyai nilai paling kecil di antara berbagai lag yang diajukan.

Tabel 4.6
Hasil Uji Panjang Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
1	-5810.539	80.73164	9.63e+72	179.4012	180.0702*	179.6652
2	-5777.874	56.28371	5.80e+72	178.8884	180.0927	179.3636
3	-5749.134	45.98418	3.98e+72	178.4964	180.2359	179.1828
4	-5725.203	35.34355*	3.20e+72*	178.2524*	180.5272	179.1499*

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkasn tabel 4.6, hasil uji panjang lag estimasi VAR dilihat dari nilai yang paling rendah pada kriteria LR, FPE, AIC dan HQ yang terletak pada lag 4 atau mempunyai tanda "*", maka disimpulkan bahwa panjang lag optimal adalah 4.

3. Uji Stabilitas VAR

Hasil estimasi persamaan VAR yang sudah terbentuk harus diuji kestabilannya, dikarenakan jika hasil estimasi stabilitas VAR tidak stabil maka analisis *Impulse Respon Function* dan *Variance Decomposition* menjadi tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, suatu sistem VAR dikatakan stabil jika seluruh akar atau roots-nya memiliki modulus lebih kecil dari satu.

Tabel 7
Hasil Uji Stabilitas Model VAR

Root	Modulus
-0.331849 - 0.649858i	0.729684
-0.331849 +0.649858i	0.729684
-0.521183 - 0.485299i	0.712142
-0.521183 +0.485299i	0.712142
-0.104570 - 0.529789i	0.540010
-0.104570 +0.529789i	0.540010
-0.385396	0.385396
-0.189128	0.189128

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan tabel 4.7, nilai modulus dari seluruh roots memiliki nilai modulus kurang dari 1, jadi dapat disimpulkan bahwasannya estimasi stabilitas VAR yang akan digunakan untuk analisis IRF dan FEVD telah valid atau stabil karena kisaran modulus < 1.

4. Uji Kausalitas Granger

Dalam penelitian ini, uji kausalitas Granger dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Sehingga menjawab pertanyaan apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan, karena setiap variabel dalam penelitian mempunyai kesempatan untuk menjadi variabel endogen maupun eksogen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai kritis, maka terdapat

hubungan diantara variabel yang diuji. Nilai kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau sebesar 0,05.

Tabel 4.8
Hasil Uji Kausalitas Granger

No.	Hipoteis	Probabilitas
1	PBB does not Granger Cause PAD	0.0045
	PAD does not Granger Cause PBB	0.8714
2	BPHTB does not Granger Cause PAD	0.2826
	PAD does not Granger Cause BPHTB	0.0162
3	PAJAK_HOTEL does not Granger Cause PAD	0.1089
	PAD does not Granger Cause PAJAK_HOTEL	0.0684
4	BPHTB does not Granger Cause PBB	0.3902
	PBB does not Granger Cause BPHTB	0.0003
5	PAJAK_HOTEL does not Granger Cause PBB	0.7294
	PBB does not Granger Cause PAJAK_HOTEL	0.0112
6	PAJAK_HOTEL does not Granger Cause BPHTB	0.2798
	BPHTB does not Granger Cause PAJAK_HOTEL	0.7864

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa yang memiliki hubungan kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alpha 0.05, sehingga H0 akan ditolak artinya variabel tersebut mempengaruhi atau berpengaruh terhadap variable lain. Dari pengujian Granger diatas, kita mengetahui hubungan timbal-balik/ kausalitas sebagai berikut:

a. Variabel PBB secara statistik signifikan mempengaruhi PAD yaitu sebesar 0.0045. Sedangkan variabel PAD secara statistik tidak signifikan

mempengaruhi PBB yaitu sebesar 0.8714. Sehingga disimpulkan bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel PBB dan PAD.

b. Variabel BPHTB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PAD yaitu sebesar 0.2826. Sedangkan PAD secara statistik signifikan mempengaruhi BPHTB yaitu sebesar 0.0162. Sehingga disimpulkan bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel PAD dan BPHTB.

c. Variabel Pajak Hotel secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PAD dan begitu pula sebaliknya, dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0.1089 dan 0.0684. Sehingga disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel Pajak Hotel dan PAD.

d. Variabel BPHTB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PBB yaitu sebesar 0.3902. Sedangkan Variabel PBB secara statistik signifikan mempengaruhi BPHTB yaitu sebesar 0.0003. Sehingga disimpulkan bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel PBB dan BPHTB.

e. Variabel Pajak Hotel secara statistik tidak signifikan mempengaruhi PBB yaitu sebesar 0.7294. Sedangkan Variabel PBB secara statistik signifikan mempengaruhi Pajak Hotel yaitu sebesar 0.0112. Sehingga disimpulkan bahwa terjadi kausalitas searah antara variabel PBB dan Pajak Hotel.

f. Variabel Pajak Hotel secara statistik tidak signifikan mempengaruhi BPHTB dan begitu pula sebaliknya, dibuktikan dengan nilai probabilitas masing-masing lebih besar dari 0,05 yaitu 0.2798dan 0.7864. Sehingga

disimpulkan tidak terjadi kausalitas apapun untuk kedua variabel Pajak Hotel dan BPHTB.

5. Uji Kointegrasi

Uji ini digunakan untuk menentukan keberadaan kointegrasi antar variabel serta untuk menentukan metode apa yang nantinya akan digunakan. Jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel, maka metode yang digunakan adalah model VAR yang hanya bisa mengestimasi hubungan jangka pendek. Jika terdapat kointegrasi antar variabel, maka metode yang tepat dalam menganalisis hubungan jangka panjang dan pendek adalah dengan metode VECM. VECM dapat mengestimasi hubungan jangka panjang dan pendek antar variabel.

Pengujian kointegrasi pada penelitian ini menggunakan metode uji kointegrasi dari *Johansen Trace Statistic test*. Kriteria pengujian kointegrasi pada penelitian ini didasarkan pada *Trace Statistic* dan *Max-Eigen Statistic* dengan panjang kelambanan 1-4. Jika nilai *Trace Statistic* dan *Max-Eigen Statistic* lebih besar daripada *critical value* 5%, maka hipotesis alternatif yang menyatakan jumlah kointegrasi dapat diterima.

Tabel 4.9
Hasil Uji Kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Trace Statistic	0.05 Critical Value
None *	129.0396	47.85613
At most 1*	78.24496	29.79707
At most 2*	48.28460	15.49471
At most 3*	23.97675	3.841466

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Hypothesized No. of CE(s)	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value
None *	50.79467	27.58434
At most 1*	29.96036	21.13162
At most 2*	24.30785	14.26460
At most 3*	23.97675	3.841466

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan tabel 4.9, dapat dilihat bahwa nilai *trace statistic* dan *Max-Eigen Statistic* > *critical value* mulai dari hipotesis *(None* *) sampai pada *at most 3**. Hal ini berarti hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada kointegrasi ditolak dan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada kointegrasi diterima atau tidak dapat ditolak. Maksudnya, dalam jangka panjang dan jangka pendek terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut. Sehingga metode VECM adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

6. Uji Estimasi VECM

Hasil estimasi vecm untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Vecm dikatakan signifikan atau mempunyai pengaruh baik untuk jangka pendek dan jangka panjang apabila nilai t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabel.

Tabel 4.10
Hasil Estimasi VECM Jangka Panjang

Jangka Panjang				
Variabel Dependen	**Variabel Independen**	**Koefisien**	**T-Statistik**	**Keterangan**
PAD	PBB	-4.608117	-5.52171	Berpengaruh Signifkan
	BPHTB	10.70483	1.47659	Berpengaruh Tidak Signifkan
	Pajak Hotel	421.1112	5.21150	Berpengaruh Signifkan

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil estimasi vecm jangka panjang menunjukkan bahwa hampir semua variabel yaitu PBB dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, kecuali variabel BPHTB terhadap PAD yang berpengaruh tidak signifikan karena t-statistic lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar 1,99547. Nilai t-statistik untuk masing-masing variabel adalah sebesar -5.52171 untuk PBB, 1.47659 untuk BPHTB, dan 5.21150 untuk pajak hotel terhadap PAD. Nilai koefisien yang didapatkan hampir semuanya bernilai positif yang menandakan hubungan antara variabel independen

berpengaruh postift erhadap variabel dependen, kecuali pada variabel PBB yang berpengaruh negatif terhadap PAD.

Berdasarkan dari hasil estimasi vecm pada jangka panjang, variabel PBB berpengaruh negatif terhadap PAD dengan nilai koefisien -4.608117. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada PBB maka akan ada penurunan yang terjadi pada PAD sebesar -4.608117%. Variabel BPHTB berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap PAD dengan nilai koefisien yaitu sebesar 10.70483. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada BPHTB maka tidak akan ada pengaruhnya pada jumlah penerimaan PAD. Dan variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD dengan nilai koefisien 421.1112. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada pajak hotel maka akan ada juga peningkatan yang terjadi pada PAD sebesar 421.1112%.

Tabel 4.11
Hasil Estimasi VECM Jangka Pendek

Jangka Pendek				
Variabel Dependen	**Variabel Independen**	**Koefisien**	**T-Statistik**	**Keterangan**
PAD	PBB	-3.419320	-4.32242	Berpengaruh Signifikan
	BPHTB	5.023994	1.27249	Berpengaruh Tidak Signifikan
	Pajak Hotel	84.13978	2.64148	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Hasil untuk estimasi vecm dalam jangka pendek pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa hampir semua variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD, kecuali pada variabel BPHTB terhadap PAD yang berpengaruh tidak signifikan karena t-statistic BPHTB adalah 1.27249 lebih kecil dari t-tabel yaitu sebesar 1,99547. Pada variabel PBB dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD karena t-statistic lebih besar dari t-tabel masing-masing adalah -4.32242% dan 2.64148%.

Berdasarkan hasil estimasi VECM jangka pendek, variabel PBB memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar -3.419320. Hal ini menujukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada PBB maka akan terjadi penurunan pada PAD yaitu sebesar -3.419320%. Variabel BPHTB memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 5.023994. Hal ini menujukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada BPHTB maka tidak akan ada pengaruhnya pada jumlah penerimaan pada PAD. Pada variabel Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar sebesar 84.13978. Hal ini menujukkan bahwa ketika ada peningkatan 5% pada pajak hotel maka akan terjadi penurunan pada PAD sebesar 84.13978%.

7. Analisis *Impuls Responses Function* (IRF)

Analisis IRF menjelaskan bagaimana dampak dari guncangan atau (shock) pada satu variabel terhadap variabel yang lain, dimana tidak hanya dalam waktu pendek tetapi juga sebagai infomasi jangka panjang. Jadi Uji *Impulse Response Function* (IRF) disini digunakan untuk melihat respon variabel PAD akibat adanya shock atau guncangan dari variabel PBB, BPHTB dan pajak hotel. Analisis *impulse response function* juga berguna untuk melihat berapa lama pengaruh tersebut terjadi.

Grafik 4.1
Hasil Uji Analisis *Impuls Responses Function* (IRF)

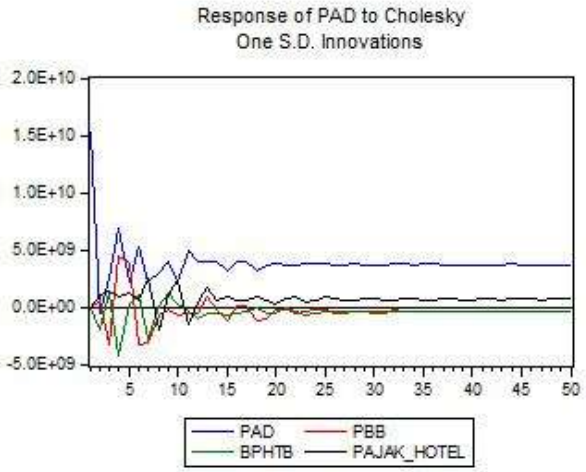

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan hasil analisis *Impulse Response Function* (IRF) diatas yang ditunjukkan pada grafik 4.1 yang melibatkan variabel PBB, BPHTB dan pajak hotel sebagaimana impuls yang terkena shock atau guncangan, bisa

dilihat dari bentuk *shock* atau guncangan pada variabel yang cukup stabil, dimana garis menunjukkan semakin meningkat atau menurun di setiap variabel. Shock (guncangan) pada masing-masing variabel tampak belum direspon oleh variabel PAD pada periode pertama. Adanya shock (guncangan) terhadap PAD dimulai pada periode kedua di masing-masing variabel. Dan pada periode selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. PBB menunjukkan guncangan yang negatif pada periode kedua yakni sebesar -2,23% dan mulai direspon positif pada periode keempat yaitu menjadi 5,8%. Kemudian mengalami guncangan tidak stabil, kadang naik dan kadang turun sampai pada periode ke-22 yaitu sebesar -3,09%. Kemudian guncangan positif mulai terjadi terus menerus dan stabil pada periode ke-23, walaupun naik dan turun namun tidak begitu banyak sampai pada periode ke-50 yaitu sebesar 2,86%. Sehingga bisa dikatakan bahwa PBB berpengaruh positif terhadap PAD, jika PBB meningkat maka PAD juga ikut meningkat.
b. BPHTB menunjukkan guncangan yang negatif pada periode kedua yakni sebesar -3,36%. Kemudian mulai direspon positif pada periode ke-3 menjadi 2,86%. Pada periode selanjutnya, BPHTB mengalami guncangan tidak stabil, kadang naik dan kadang turun sampai pada periode ke-13 yaitu sebesar -1,30. Kemudian guncangan negatif mulai terjadi terus menerus pada periode ke-14 sampai pada periode ke-50 adalah sebesar -

8,33%. Sehingga bisa dikatakan bahwa BPHTB berpengaruh negatif terhadap PAD, jika BPHTB meningkat maka PAD akan menurun.

c. Pajak Hotel menunjukkan guncangan yang positif pada periode kedua yakni sebesar 1,7%. Kemudian direspon negatif pada periode ke-4 menjadi -1,94%. Dan pada periode berikutnya mengalami guncangan tidak stabil, kadang naik dan kadang turun sampai pada periode ke-22 yaitu sebesar -2,3%. Selanjutnya, guncangan positif mulai terjadi terus menerus dan stabil pada periode ke-23 sebesar 7,37%, walaupun naik dan turun, namun tidak begitu banyak sampai pada periode ke-50 adalah sebesar 4,01%. Sehingga bisa dikatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD, jika pajak hotel meningkat maka PAD juga ikut meningkat.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guncangan stabil tercepat jika diurutkan berdasarkan periode variabel adalah PBB pada periode ke-23, BPHTB pada periode ke 14, dan Pajak Hotel pada periode ke-23.

8. Analisis *Variance Decomposition*

Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) memiliki tujuan yaitu untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Grafik 4.2
Hasil Uji Analisis *Variance Decomposition* (VD)

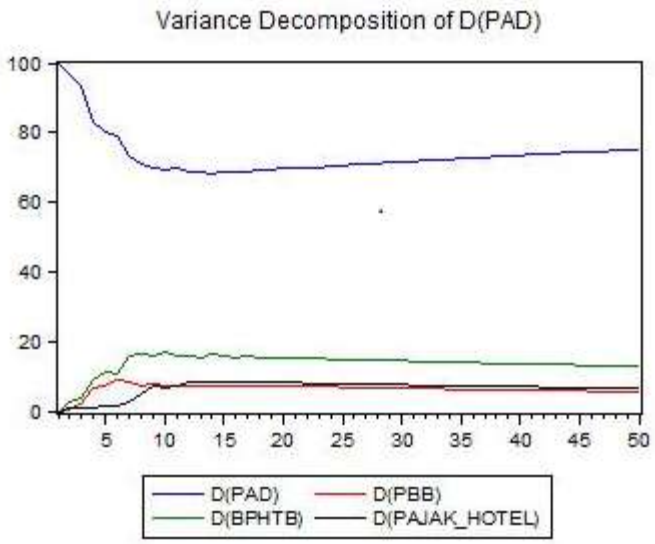

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2020.

Berdasarkan hasil dari uji FEVD didapatkan informasi bahwa variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel memiliki kontribusi dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi variabel paling besar terhadap PAD pada urutan pertama adalah variabel BPHTB, kemudian diikuti oleh variabel Pajak Hotel, dan kemudian yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah variabel PBB.

Variabel BPHTB yang memiliki kontribusi besar terhadap PAD mulai terlihat pada periode kedua sebesar 2,4% dan terus menerus meningkat hingga periode ke-50 sebesar 12,9%. Pada variabel pajak hotel memiliki

kontribusi terhadap PAD yang mulai terlihat pada periode kedua sebesar 0,63% dan terus menerus meningkat hingga periode ke-50 sebesar 6,48%. Sedangkan variabel PBB yang memiliki kontribusi paling kecil terhadap PAD mulai terlihat pada periode kedua yaitu sebesar 0,01%. Dan terus menerus meningkat, walaupun naik dan turun namun tidak begitu banyak sampai pada periode ke-22 yaitu sebesar 7,01%%. Kemudian mengalami penurunan lagi pada periode ke-23 sampai pada periode ke-50 yaitu sebesar 5,6%.